

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN GADAI
TANPA SEPENGETAHUAN RAHIN**

(Studi pada Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)



Program Studi: Mu'amalah

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1438 H/2017 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN GADAI
TANPA SEPENGETAHUAN RAHIN**

(Studi pada Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh:

Venti Oktamelya

NPM: 1421030323

Jurusan : Mu'amalah

Pembimbing I : H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M.H

Pembimbing II : Frenki, S.E.I.,M.Si

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1438 H/2017 M

ABSTRAK

Praktik gadai sudah lama di praktikan di tengah-tengah masyarakat di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Peisir Barat. Praktik gadai tanah sawah atau perkebunan yang dilakukan di desa Negeri Ratu dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu dengan datangnya *rahin* menemui *murtahin* bermaksud untuk meminjam uang dengan jaminan tanah sawah atau perkebunan, dengan jangka waktu yang tidak ditentukan yaitu, ketika pihak *rahin* telah memiliki uang untuk membayar utang dan mengambil kembali jaminannya. Namun seiring berjalanya waktu *murtahin* menjaminkan kembali jaminan tersebut kepada pihak lain, yang dilakukan *murtahin* tanpa pemberitahuan atau tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak *rahin*. Akad semacam ini tentunya menguntungkan salah satu pihak. Pihak yang merasa dirugikan adalah pihak *rahin*, karena tanah miliknya sudah berada pada pihak ketiga tanpa sepengetahuannya. Sementara *murtahin* mendapatkan kemudahan dari transaksi tersebut, yang pada dasarnya praktik gadai tersebut hanya dengan unsur kepercayaan saja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengalihan objek jaminan gadai tanpa sepengetahuan *rahin*, sehingga bisa mengetahui tanggung jawab seperti apa yang seharusnya dilakukan pihak *murtahin*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reseach*), sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik gadai yang dilakukan pada Desa Negeri Ratu sudah sesuai dengan rukun namun syarat gadai belum semua terpenuhi. Adapun mengenai praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* adalah tidak dibenarkan dalam hukum Islam. karena pada dasarnya *murtahin* hanya menahan barang gadai dan tidak dibenarkan mengalihkan objek jaminan gadai tanpa mendapat izin dari penggadai (*rahin*). Barang gadai adalah untuk memberi jaminan kepada pemegang gadai (*murtahin*), sebagai jaminan bahwa *rahin* akan mengembalikan uang pinjamannya kepada pihak *murtahin* dan setelah utang dibayar *rahin* akan mendapatkan kembali barang jaminan itu.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telepon (0721) 703521, 780421 fax. (0721) 78422

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi

Saudara :

Nama Mahasiswa : Venti Oktamelya
Npm : 1421030323
Program Studi : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin (Studi pada Desa Negeri Ratu Kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

Frenki, S.E.I., M.Si.
NIP. 198003152009011017

**Mengetahui ,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telepon (0721) 703260 fax. (0721) 78422

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin (Studi pada Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)**, disusun oleh **Venti Oktamelya NPM. 1421030323**, Program Studi **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal: Rabu, 07 Maret 2018.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Drs. H. Khoirul Abror, M.H.

Sekretaris : Herlina Kurniati., S.H.I., M.E.I.

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Penguji II : H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002**

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي أَوْثَقَكُمْ بِعَهْدِكُمْ وَلَيَقَّ اللَّهُ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah Ayat 283)*

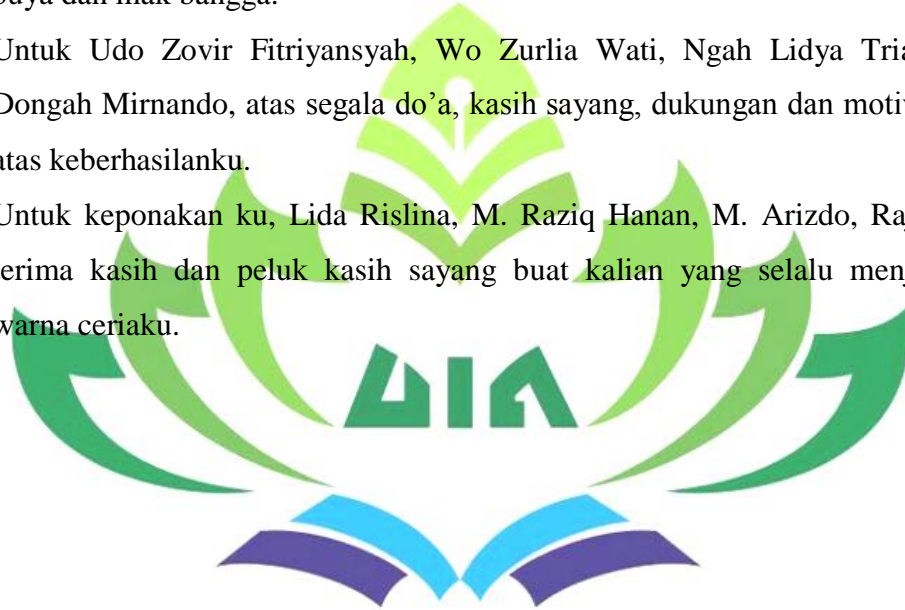


* Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan Spesial for woman* (Bamdung: Sygma Examedia Arkanleema, 2008), h. 49

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Untuk Buyaku tercinta Zirwan dan emakku Mas Remaja, atas segala jasa, pengorbanan, do'a, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga dengan upayaku bisa membuat buya dan mak bangga.
2. Untuk Udo Zovir Fitriyansyah, Wo Zurlia Wati, Ngah Lidya Triana, Dongah Mirnando, atas segala do'a, kasih sayang, dukungan dan motivasi atas keberhasilanku.
3. Untuk keponakan ku, Lida Rislina, M. Raziq Hanan, M. Arizdo, Rajwa terima kasih dan peluk kasih sayang buat kalian yang selalu menjadi warna ceriaku.



RIWAYAT HIDUP

Venti Oktamelya, dilahirkan di Dusun Tingal, Desa Balam, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 05 Oktober 1996, anak kelima dari lima bersaudara, cinta kasih dari pasangan Bapak Zirwan dan Ibu Mas Remaja.

Menempuh pendidikan berawal pada:

1. Sekolah Dasar Negeri Kerbang Dalam pada tahun 2002 selesai pada tahun 2008
2. SMP Negeri 3 Kota Karang Pesisir Utara pada tahun 2008 selesai pada tahun 2011
3. SMAN 1 Krui pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah tahun 2014 dan selesai pada tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Bapak H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan bapak Khoirudin, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.

3. Bapak H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing 1 dan bapak Frengky, S.E.I.,M.Si. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
5. Tim penguji terdiri dari bapak Drs. H. Khoirul Abror, M.H. selaku ketua sidang, ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. bapak H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku penguji I, ibu Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I selaku sekretaris sidang, terimakasih telah membantu menyelesaikan tugas akhirku
6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Muamalah Angkatan 2014, khususnya sahabatku yang ada di Muamlah F, yang telah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Intan, Eva, Citra, Anas, Chashilda, Anisa, Arin, Hasiyah, Zubaidah, Aulia, Anggun, terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
9. Sahabat-sahabat SMA 1 Pesisir Tengah, Siti, Noviyana, Noviyanti, Ovi, Riska, Melya, Peni, terimakasih dukungannya.
10. Sahabat-sahabat UKK KSR PMI, KSPMS, Komunitas GENBI UIN Raden Intan Lampung, terimakasih atas dukungannya.
11. Sahabat-sahabat KKN Desa Sidomekar, kelompok 1 angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan motivasi.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah swt.

Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Amin

Bandar Lampung, Maret 2018

Penulis

Venti Oktamelya
NPM. 1421030323



DAFTAR ISI

	Halaman
COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian dan Sifat Gadai	14
B. Landasan Hukum Gadai	18
C. Rukun dan Syarat-syarat Gadai	25
D. Akad dan Hukum Gadai	35
E. Hak dan Kewajiban Murtahin	39
F. Hak dan Kewajiban Rahin	39
G. Pemanfaatan Barang Gadai	40
H. Berakhirnya Akad Gadai	45
 BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian	49
1. Sejarah Berdirinya Desa Negeri Ratu	49
2. Letak Geografis Desa Negeri Ratu	50
3. Keadaan Demografis Desa Negeri Ratu	50
4. Struktur Desa Negeri Ratu	55
B. Pelaksanaan Pengalihan Objek Gadai	56
C. Motivasi Pengalihan Objek Gadai	63

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin pada Masyarakat Desa Negeri Ratu	65
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pengalihan Gadai tanpa Sepengetahuan Rahin pada Desa Negeri Ratu	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul, diperlukan adanya penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Judul skripsi ini adalah **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin (Studi pada Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)**. Adapun istilah-istilah dalam judul adalah sebagai berikut:

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹

Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber *Al-Qur'an* dan *Sunnah* baik ketetapan langsung ataupun tidak langsung.²

Pengalihan adalah pelimpahan hak serta kewajiban dari seseorang bertanggung kepada pihak lain, sehingga bertanggung sudah tidak memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi serta di bebaskan dari kewajiban.³

Gadai merupakan salah satu perjanjian dimana menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470.

² Bunyana Shilihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h.11

³ *Op.Cit.* h. 1.121

dalam membayar utang. Jaminan adanya barang disini untuk memperkuat kepercayaan dari orang yang memberikan hutang kepada yang berhutang.⁴

Rahin adalah pihak yang menyerahkan barang jaminan dalam transaksi *rahn*.⁵

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin*, dan meninjau pengalihan gadai menurut hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dalam memilih dan menentukan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin” adalah:

1. Alasan Objektif

Karena adanya praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* di masyarakat Desa Negri Ratu sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam

2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini didukung dengan literatur yang memadai sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Selain itu judul yang diangkat erat relevansinya dengan jurusan mu'amalah sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni saat ini.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 193.

⁵ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 679.

- b. Berdasarkan data di jurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkannya untuk mengangkat sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam (Syari'ah) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam masa kini. Prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini, dan akan tetap berlaku di masa depan.⁶ Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk saling membantu, tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan orang lain. Hukum Islam memberikan tuntutan pada setiap orang yang bermuamalah berkewajiban mentaati peraturan dengan baik, salah satunya adalah masalah pinjaman.

Pada umumnya pinjaman yang dilakukan secara sukarela sering dimaknai sebagai bagian dari infak, dan sadaqah, sedangkan pinjaman yang dipraktikkan dalam masyarakat saat ini membutuhkan alat pengikat sebagai jaminan dari kewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang ada. Dalam konsep *fiqh* suatu sarana pengikat terhadap pinjaman atau transaksi tidak tunai yang di lakukan antara kedua belah pihak disebut dengan akad *rahn*.⁷

Gadai dalam *fiqh* disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut *syara'* artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara

⁶ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 27.

⁷ Ruslan Abdul Ghofur N, *Gadai Syariah, (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2012), h. 4.

hak, dan dapat diambil kembali sebagai tebusan. Gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut Syari'at sebagai jaminan hutang, sehingga orang tersebut diperbolehkan mengambil hutang atau mengambil sebagian manfaat barang gadaian.⁸ Namun kepemilikan atas barang tersebut tetap milik *rahin* (yang menggadaikan), sehingga *murtahin* (pemegang gadai) tidak memiliki kuasa atas barang tersebut, baik dijual, dipinjamkan, disewakan dan diambil manfaatnya.

Para ulama sepakat, hukum gadai secara umum diperbolehkan, sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَيْنَا بِبَعْضِهَا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” Q.S., Al-Baqarah (2): 283

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan petunjuk mengenai prinsip kehati-hatian apabila seseorang akan melakukan transaksi hutang-

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 187.

⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya Special for woman*, (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema, 2008), h. 49

piutang yang memakai jangka waktu dengan pihak lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*). Gadai juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ¹⁰ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya sebagai jaminan”, (H.R.Muslim).

Berdasarkan al-Qur'an dan hadis dapat dipahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan non-muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan dalam hukum Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.

Praktik pelaksanaan gadai tidak selamanya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan gadai tanah di desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara sejauh ini praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat belum sesuai dengan Syari'at Islam. Karena pada saat masyarakat di desa Negeri Ratu membutuhkan uang dalam jumlah yang besar mereka melakukan praktik gadai sawah ataupun perkebunan.

¹⁰ Abi al-Husayn Muslim, *Shahih Ai-Muslim* juz II (Beirut:Dar Al-Fikr, 1992), h.51

Hal itu dilakukan karena kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai tersebut dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu *rahin* yang akan menggadaikan tanahnya datang menemui *murtahin* yang akan memberikan pinjaman uang.

Masyarakat desa Negeri Ratu biasanya menggadaikan sawah atau perkebunan kepada kerabat atau tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian hutang pinjaman tidak ditentukan, yaitu ketika pihak *rahin* telah memiliki uang untuk membayar utang, dengan tanah perkebunan atau sawah yang dijadikan sebagai jaminan. Kemudian tanah atau sawah tersebut berpindah tangan dengan diserahkan kepada pihak ketiga karena *murtahin* membutuhkan uang. Sawah atau perkebunan yang menjadi jaminan tersebut berpindah kepemilikan tanpa pemberitahuan kepada *rahin*, Selama berada ditangan *murtahin*, hak penggarapan dan penanaman sawah berada ditangan *murtahin*.

Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak *murtahin*. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan, dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan antara penggadai dan penerima gadai tidak mendatangkan saksi karena sudah saling percaya.

Pada saat penggadai (*rahin*) melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena harus menikhhlaskan barang yang digadaikan (*marhun*) pemanfaatannya dan hasilnya dimiliki oleh penerima gadai

(*murtahin*) serta batas waktunya tidak ditentukan. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang lebih penting adalah memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, kiranya dipandang laik untuk mengadakan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin (Studi pada Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat).”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* di Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* di Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* yang terjadi pada masyarakat di Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan tata cara pelaksanaan praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* di Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengalihan gadai.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi mengenai Pengalihan Gadai tanpa Sepengetahuan *Rahin* yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan praktik gadai dalam masyarakat
- b. Secara praktis, untuk menambah dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan syariah tentang gadai dan praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*Field Research*). Yaitu, suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang di jadikan objek penelitian. Yaitu desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti.¹¹ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik dari pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* ditinjau dari hukum islam.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang di peroleh dari lapangan dengan cara

¹¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), h.19.

wawancara. Penelitian ini dapat diperoleh dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu pihak *rahin* dan *murtahin*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen. yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak *rahin* dan *murtahin*.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹² Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Negri Ratu Kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat yang melakukan gadai dan praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* berjumlah kurang dari 100 orang. Yaitu 6 orang, 3 orang sebagai *rahin* dan 3 orang *murtahin*.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.137.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi atau seluruh populasi yang diteliti. Jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Menurut Suharsimi Arikunto apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100, maka semua populasi dijadikan sampel.¹³ Jadi sampel yang diteliti adalah 6 orang masyarakat di desa Negri Ratu, yang terdiri dari 3 orang *rahin* dan 3 orang *murtahin* yang melakukan pengalihan gadai tanpa sepengetahuan

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat-alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Yaitu dengan melakukan wawancara kepada *rahin*

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.188.

(penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai). Yang ada di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung ke pada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

5. Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti sudah lengkap dan benar setelah semua data terkumpul.
- b. Sistematika data (*sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁴

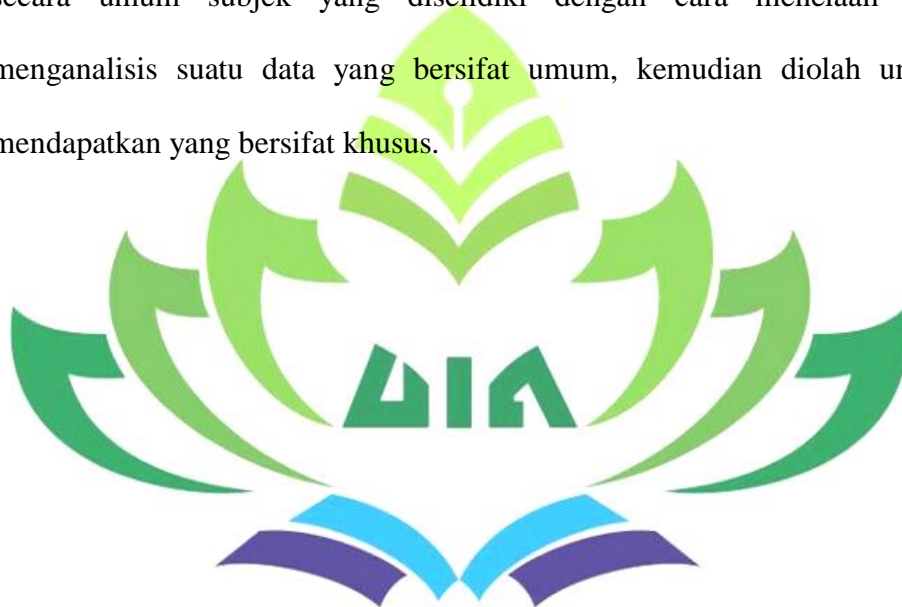
Berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

¹⁴ Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h. 107.

dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.¹⁵ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* menurut hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode *deskriptif kualitatif* berdasarkan teori gadai. Dimana melalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan yang bersifat khusus.



¹⁵ Ibid., h. 335.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Sifat Gadai

1. Pengertian Gadai

Dalam fikih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan barang jaminan yang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang.¹⁶

Gadai menurut bahasa arab adalah *Rahn* yang artinya tetap dan lestari, dan dinamakan juga *al-habsu* artinya penahanan. Seperti dikatakan “*Ni’matun Rahinah*” yang artinya karunia yang tetap dan lestari.¹⁷ Secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang” dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.¹⁸

Di dalam pengertian istilah adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus.

Adapun menurut pengertian *syara’*, yang dimaksud dengan gadai adalah menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara’* sebagai jaminan atas utang¹⁹, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau boleh mengambil sebagian

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1

¹⁷ Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*, juz 12, terj. Kamaluddin A,dkk, (Bandung: Alma’rif, 1997), h.139

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105

¹⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131

(manfaat) atas barang yang dijadikan jaminan itu.²⁰

Berdasarkan Firman Allah awt dalam QS. Al-Muddassir: 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ^{٢١}

“Tiap-tiap pribadi bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Definisi *ar-rahn* menurut istilah adalah:

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيَمَةً مَالِيَّةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيقَةً بَدَيْنَ بَحِيْثٍ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَخْذَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan benda yang bernilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk melunasi utang dari harta itu atau sebagainya”²²

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan definisi yang tidak berbeda *ar-rahn* adalah:

حَبَسَ شَيْءٌ يَحَقُّ يُمَكِّنُ اسْتِفَاؤَهُ مِنْهُ أَيْ جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيَمَةً مَالِيَّةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيقَةً بَدَيْنَ بَحِيْثٍ يُمَكِّنُ أَخْذَ الدَّيْنِ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ تِلْكَ أَعْيُنٍ

“Menahan hak milik yang dapat dijadikan pelunas utang, artinya menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara’* untuk kepercayaan suatu utang sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau

²⁰ Sayyid Sabbiq, Loc.Cit., h.139

²¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya Special for woman*, (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema, 2008), h. 576

²² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Cetakan ke-8, vol. III, Darul Kitab al-Arabi, Beirut, 1987, h. 169.

sebagian dari benda itu”²³

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Syafi’iyah

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang”.²⁴

Ulama Syafi’iyah mendefinisikan akad *ar-rahn* seperti berikut, yaitu menjadikan barang sebagai jaminan utang yang digunakan untuk membayar utang gadai tersebut ketika pihak yang berhutang tidak bisa membayar.. Kalimat, “menjadikan suatu benda” mengandung makna bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan, karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.²⁵

2. Menurut Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah mendefinisikan *ar-rahn* sebagai sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *watsiiqah* (penjamin) utang yang lazim. Maksudnya adalah suatu akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari harta berbentuk *al-Ain* (barang yang hartanya berbentuk) seperti harta yang tidak bergerak seperti tanah dan rumah, juga seperti hewan dan

²³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 251-252

²⁴ Khumedi Ja, far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung; Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung 2015), h. 214

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 107

barang komoditi, atau hal-hal yang dapat dimanfaatkan lainnya misalnya seperti tenaga keahlian namun dengan syarat yang harus jelas dan ditentukan masanya.

3. Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ar-rahn* yaitu menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian.

4. Menurut Ulama Hanabillah

Ulama Hanabillah mendefinisikan *ar-rahn* yaitu harta yang dijadikan sebagai jaminan utang gadai yang ketika pihak yang menanggung hutang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut terbayar dengan menggunakan harta hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan utang gadai.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang gadai yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bernilai harta milik *rahin* (peminjam) yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga pihak *murtahin* (yang menahan) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya dari barang gadai yang dijadikan sebagai jaminan, apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utang pada waktu yang telah disepakati, barang jaminan dijual dan dibayarkan

utang dan jika dalam penjualan barang jaminan ada kelebihan maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Sifat Gadai

Rahn secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Rahn juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan qirad. Semua termasuk akad *tabarru'* (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al qabdu*), sesuai kaidah لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ (tidak sempurna akad *tabarru'* kecuali pemegangan).²⁶

B. Landasan hukum Gadai

Para ulama fikih mengemukakan bahwa menggadaikan barang boleh hukumnya baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun di dalam perjalanan, hukum ini disepakati oleh umum *mujtahidin*.²⁷ Akad *rahn* diperbolehkan oleh *syara'* dengan berbagai dalil *al-Qur'an*, *As-Sunnah* dan *Ijma'*:

²⁶ Khumedi ja'far Op.Cit.,h. 214-215

²⁷ Teuku Muhammad Hasbi Shiddieqy, "Hukum-hukum Fikih Islam" (Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 362

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) 283, yaitu :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنَيْتُمْ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ عِنْدَ اللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan).

Berdasarkan ayat di atas agar lebih mudah dipahami tafsiranya yang dikutip dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, yaitu:

Firman Allah SWT. وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ “Jika kamu dalam perjalanan”. Yakni, sedang melakukan perjalanan dan terjadi utang-piutang sampai batas waktu tertentu وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis”. Yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibnu ‘Abbas mengatakan: “Atau mereka yang mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi jaminan. Maksudnya, penulis itu diganti dengan jaminan yang dipegang oleh si pemberi pinjaman.” Firman Allah Ta’ala: فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً “Maka

²⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya Special for woman*, (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema, 2008), h. 49

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". Ayat ini yang dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana pendapat Imam Asy-syafi'i dan Jumhur Ulama, dan ulama yang lain yang menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan jaminan gadai. Ini merupakan riwayat dari Imam Ahmad. Sekelompok ulama lain juga berpendapat demikian.²⁹

Adapun fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan barang pinjamannya (*marhun bih*) dengan menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan waktu pengembalian utangnya.³⁰

Tuntunan-tuntunan dalam ayat yang lalu tidak sulit untuk dilaksanakan, jika seseorang berada dalam kota dimana para saksi dan penulis berada. Tetapi, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang-piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

²⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir, (*Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*), penj. M. Abdul Ghofur, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Bogor, 2004, h.569

³⁰ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Penerbit Alfabeta, 2011), h.178

Diperbolehkannya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, ini bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan ketika dalam perjalanan. Nabi saw, pernah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dengan demikian, penyebutan kata dalam perjalanan hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis ketika dalam perjalanan.³¹

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa gadai merupakan suatu yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah. Bahkan Syari'at Islam mengajarkan kepada umatnya supaya tolong-menolong dalam kebaikan, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٨﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

QS. Al-Maidah (5) 2.³²

³¹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an*/M.Quraish Shihab, (Jakarta: Lentera Hati, 2002. Jilid 1, h.739

³² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya Special for woman*, (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema, 2008), h. 106

2. As-Sunnah

Dalil diperbolehkannya *ar-rahn* selain telah disebutkan di dalam al-Qur'an, juga dapat berlandaskan pada Sunnah Rasul yang berfungsi sebagai penjelas dan pendapat diperbolehkannya *ar-rahn* yang terdapat di dalam *al-Qur'an*.

Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya ketika sedang dalam perjalanan, seperti di jelaskan dalam hadits Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ³³ (رواه مسلم)

“Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya sebagai jaminan”, (H.R.Muslim).

Berdasarkan hadist di atas, dapat dipahami bahwa Islam tidak membedakan antara orang muslim dan non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar hutangnya sekalipun kepada non muslim. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu diperbolehkan. Mereka tidak mempertentangkan kebolehnya, demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat disyariatkannya gadai dalam waktu tidak bepercian dan waktu bepercian, berargumentsai kepada perbuatan Rasulullah saw, terhadap orang Yahudi di Madinah.³⁴

³³ Abi al-Husayn Muslim, *Shahih Ai-Muslim* juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), h.51

³⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h, 159

3. Ijma

Dasar hukum *ar-rahn* selain atas dasar firman Allah SWT dan Hadis Nabi, *rahn* juga dituliskan atas dasar ijma. Jumhur ulama telah sepakat bahwa status hukum gadai (*ar-rahn*) diperbolehkan dalam bermuamalah.³⁵ *Rahn* dapat dilakukan baik dalam bepergian (*safar*) maupun tidak dalam *safar*.³⁶

Ijma ini berlandaskan pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 283 dan hadits yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim tentang kisah nabi Muhammad SAW, beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi untuk mendapatkan makanan.³⁷

4. Fatwa Dewan Nasional

Adapun Fatwa Dewan Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan umum:³⁸

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h.290

³⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.234

³⁷ Zainudin Ali. *Op.Cit.*,h. 8

³⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014)

- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatanya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*
- 6) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- 7) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
- 8) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 9) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

b. Ketentuan penutup³⁹

- 1) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibanya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

C. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan suatu perikatan telah kita ketahui bahwa terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi, suatu akad yang jika tidak memenuhi rukun dan syarat maka akad tersebut tidak sah hukumnya, sama halnya dalam gadai (*ar-rahn*) harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun dan syarat *rahn* telah diatur dalam syara' (hukum Islam) sehingga *rahn* dapat dikatakan sah. Berikut adalah penjelasan rukun dan syarat gadai,

1. Rukun Gadai

Kesepakatan dalam perjanjian penggadaian suatu barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad pinjam meminjam atau utang-piutang, karena tidak akan terjadi dan tidak ada alasan lain seseorang menggadaikan barang atau bendanya jika tidak terdapat utang yang dimilikinya.⁴⁰ Utang-piutang sendiri hukumnya adalah mubah bagi orang

³⁹Khotibul Umam, Perbankan Syariah: *Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 177

⁴⁰ Zainudin dan Muhammad jamhari, *Al-Islam 2. Muamalah dan Akhlaq* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet.1, h.18

yang berutang dan sunnah bagi yang mengutang karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib ketika orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya.⁴¹

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun *rahn*. Adapun menurut jumhur ulama rukun *rahn* memiliki empat unsur, yaitu :

- a. *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), adalah kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.
- b. *Ar-rahin* dan *Al-murtahin*, *Ar-rahin* (orang yang menggadaikan) yaitu orang yang telah dewasa, berakal dan bisa dipercaya. *Al-murtahin* (yang menerima gadai) yaitu orang, bank, dan lembaga yang dipercaya oleh pihak *rahin* untuk memperoleh modal dengan barang jaminan (gadai),
- c. *Al-marhun*, (harta yang dijadikan agunan) yaitu barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin* untuk mendapatkan modal
- d. *Al-marhun bih*. (hutang) yaitu sejumlah dana yang diperoleh *rahin* dari *murtahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*⁴²

Adapun syarat yang wajib disempurnakan dalam akad gadai dalam hukum Islam dapat dilihat dari persyaratan *aqid*, *syarat sighat*, *syarat marhun bih* (hutang), dan *al-marhun* (barang yang dijadikan jaminan).

Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* adalah *ijab* dan *qabul* dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi,

⁴¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), Edisi ke 4, h.175

⁴² Haroen Nasroen, *Op.Cit.*, h.254

akad *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.⁴³

Gadai atau pinjam meminjam memiliki rukun yang harus dipenuhi seperti yang telah dijelaskan.⁴⁴

2. Syarat Gadai

Dalam setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat, berkaitan dengan *rahn*, syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya

a. Persyaratan aqid

Kedua orang yang akan melakukan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama *Syafi'iyah ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk melakukan jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus *baligh*. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya diperbolehkan melakukan *rahn*.

Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual beli. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum *baligh*. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan *mudharat* dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.⁴⁵

Ahli tasharuf Yaitu *rahin* dan *murtahin* mampu membelanjakan

⁴³ Khumedi jaafar, *Op.Cit.*, h. 217

⁴⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),

⁴⁵ Rahmat syafei, *Op.Cit.*, h. 162

harta dan memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.⁴⁶

Cakap bertindak menurut hukum artinya pihak-pihak yang melakukan akad gadai cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahn* dan *murtahin* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil* baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.⁴⁷

b. Syarat Shighat

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *shighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* bukan jual-beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang *sahih* dan yang rusak. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga yaitu;

- 1) Syarat *sahih*, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
- 2) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
- 3) Syarat yang merusak akad, seperti yang mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.

⁴⁶ Ibid. h. 174

⁴⁷ Zainudin, Op.Cit., h. 22

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi menjadi dua, yaitu *rahn sah* dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah *rahn* yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipanglingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahin*.

Ulama Hanabilah berpendapat senada seperti pendapat ulama Malikiyah, yakni *rahn* terbagi dua, *sah* dan *fasid*. *Rahn sah* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

c. Syarat Marhun Bih (utang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika melakukan akad *rahn*. Rachmat Syafe'i memberikan beberapa syarat hutang atau *al-marhun bih* yang harus dipenuhi, yaitu :⁴⁸

- 1) *Marhun bih* (hendaklah barang yang wajib diserahkan). Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.
- 2) *Marhun bih* (memungkinkan dapat dibayarkan). Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *ar-rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *ar-rahn*.
- 3) Hak atas *marhun bih* harus jelas. Dengan demikian tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan hutang mana yang

⁴⁸ Rachmat syafei. Op.Cit., h.163-164

menjadi barang gadai.

Syarat *al-marhun bih* atau utang dalam melaksanakan akad gadai menurut Nasroen Haroen ada tiga syarat bagi *marhun bih*, yaitu:

- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang.
- 2) Hutang itu boleh dilunasi dengan jaminan itu.
- 3) Hutang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

d. Syarat Marhun

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Maka syarat *marhun* menurut ulama fiqih antara lain :⁴⁹

- 1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang
- 2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya *khamr* tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan *khamr* tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
- 3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
- 4) Agunan itu milik sah orang yang berutang.
- 5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain.

⁴⁹ Nasroen haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 255

- 6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- 7) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain:

- 1) Dapat diperjualbelikan
- 2) Bermanfaat jelas
- 3) Milik *rahn*
- 4) Bisa diserahkan
- 5) Tidak bersatu dengan harta lain
- 6) Dipegang (dikuasai) oleh *rahn*
- 7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Rahn dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak dipenuhi, maka *rahn* tidak sah.

e. Syarat Kesempurnaan *Rahn* (Memegang Barang)

Secara umum, ulama fikih sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*, yang didasarkan pada (QS. Al-Baqarah :283). Namun demikian, diantara para ulama berbeda pendapat, apakah memegang barang (*rahn*) termasuk syarat lazim atau syarat kesempurnaan.

Jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang (*al-qabddhu*) bukan syarat sah *rahn*, tetapi syarat lazim. Dengan demikian,

jika barang belum dipegang oleh *murtahin*, akad bisa dikembangkan lagi. Sebaliknya, jika *rahin* sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim, dan *rahin* tidak boleh membatalkannya secara sepihak.

Golongan ini mendasarkan pendapat mereka pada ayat Al-Baqarah 283, mereka berpendapat jika *rahn* sempurna tanpa memegang, maka adanya *taqyid* (penguat) dengan *فَرِهَانَ مَقْبُوضَةٍ* tidak berfaedah. Selain itu, *rahn* adalah akad yang membutuhkan *qabul*, yang otomatis harus memegang *أَوْ فُرَا بِاَلْعُقُودِ marhun*

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang *marhun* adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim. Menurut ulama Malikiyah, akad dipandang lazim dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi, *murtahin* harus meminta kepada *rahin* barang yang digadaikan, jika tidak memintanya atau merelakan *borg* ditangan *rahin*, *rahn* menjadi batal. Terdapat beberapa pendapat para ulama dalam menentukan orang yang memegang *marhun*.

Ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa diantara syarat memegang, *murtahin* harus tetap atau lama memegang *borg*. Dengan demikian menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, *rahn* batal jika *murtahin* meminjamkan atau menitipkan *borg* kepada *rahin*. Adapun menurut ulama Hanabilah, akad *rahn* tidak batal, tetapi hilang kelazimanya dan akan menjadi lazim kembali jika *rahin* mengembalikannya kepada *murtahin*. Ulama ini mendasarkan kepada Q.S Al-baqarah ayat 283.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak batal jika *murtahin* menitipkan atau meminjamkan *borg* kepada *rahin* misalnya untuk memanfaatkannya. Hal ini didasarkan ada hadist riwayat Daruqutni dan Hakim, "*rahn dikendarai dan diperah*", serta harist Al-Bukhari, "*punggung dikendarai dengan memberikan nafkahnya jika digadaikan*".⁵⁰

f. Orang yang berkuasa atas *borg*

Orang yang harus menguasai *borg* adalah *murtahin* atau wakilnya. Dipandang tidak sah jika orang yang memegang *borg* adalah *rahin* sebab salah satu tujuan memegang *borg* adalah untuk keamanan bagi *murtahin*.

Borg boleh dititipkan kepada seseorang yang disepakati oleh *rahin* dan *murtahin*. Orang tersebut disebut *al-'adl*. *al-'adl* adalah pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad *rahn* (*rahin* dan *murtahin*) agar *marhun* berada di dalam genggamannya untuk dijaga dan meletakkannya di bawah kuasanya. *Al-'adl* dianggap sebagai wakil bagi *rahin* sekaligus wakil bagi *murtahin*. *Al-'adl* adalah wakil bagi *rahin* sendiri karena *al-'adl* yang menjaga dan memelihara *marhun* atas keinginan dan pilihan sendiri karena mempercayainya dengan sifat amanahnya. Begitu juga, *al-'adl* adalah sebagai wakil pihak *murtahin* dalam tugas melakukan *al-qabdu* berdasarkan persetujuan dan ridha *murtahin*.⁵¹

- 1) Syarat-syarat *al-'adl* (orang yang mewakili pihak *rahin* dan *murtahin*)

⁵⁰ Khumedi ja'far. Op.Cit., h. 221-224

⁵¹ Wahbah Al-Juhaili, Op.Cit.,h.150

Diantara syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *al-'adl* adalah memiliki dua sifat, yaitu amanah dan bertanggung jawab.

Disyaratkan juga *al-'adl* harus orang yang sah dijadikan wakil bagi *rahin* dan *murtahin*. Dengan demikian, maka *al-'adl* tidak boleh anak kecil, gila, dan lain-lain.

2) *Borg* terlepas dari *al-'adl* (orang yang mewakili pihak *rahin* dan *murtahin*)

Borg dapat lepas dari *al-'adl* dengan alasan sebagai berikut.

- a) *Al-'adl* mengundurkan diri sebagai *al-'adl*, apabila *al-'adl* mengundurkan diri dan menyerahkan kembali marhun kepada kedua belah pihak yang mengadakan akad (*rahin* dan *murtahin*), maka kedudukannya sebagai wakil usai dan berakhir.
- b) *Rahin* meninggal. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, *borg* tidak lepas jika yang meninggal dunia itu *murtahin*.
- c) *Al-'adl* meninggal, ahli warisnya tidak berhak memegang *borg*, kecuali atas izin *rahin* dan *murtahin*.
- d) *Al-'adl* gila.
- e) *Rahin* melepaskan atau membatalkan *borg*.

3. Hukum *al-'adl* (orang yang mewakili pihak *rahin* dan *murtahin*)

al-'adl memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a) *Al-'adl* harus menjaga *borg* sebagaimana ia menjaga barang miliknya.

- b) *Al-'adl* harus tetap memegang *borg* sebelum ada izin dari yang melakukan akad untuk menyerahkan kepada orang lain.
- c) *Al-'adl* tidak boleh memanfaatkan *borg*.⁵²

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa syarat sah yang wajib dipenuhi dalam melakukan akad gadai ada empat macam, yaitu syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (*rahin* dan *murtahin*), *sighat* (lafal dari akad itu sendiri), *al-marhun bih* (hutang), dan syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan sebagai jaminan atas utang).

D. Akad dan Hukum Gadai (*Rahn*)

1. Akad *Rahn*

Kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai dalam melakukan transaksi gadai pada dasarnya atas dasar tiga jenis akad transaksi yaitu :

a. Akad *rahn*⁵³

Akad yang dimaksud adalah menahan harta milik *rahin* (penggadai) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

b. Akad *ijarah*.

Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.⁵⁴

⁵² Rachmat Syafe'I. Op.Cit.,h.166-167

⁵³ Nurul huda, muhamad heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) h.279

c. Akad *rahn* adalah akad *Tabarru'*

Rahn merupakan salah satu akad *tabarru'* (kebajikan). Sebab, pinjaman yang diberikan oleh *mirtahin* tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Sebagai akad *tabarru'*, maka akad dimaksud, mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.⁵⁵

Menurut Sayyid Sabiq, akad gadai akan di anggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu:⁵⁶

- a. Orangnya sudah dewasa
- b. Berfikiran sehat
- c. Barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai
- d. Barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadaikan barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas.

Apabila rukun sudah terpenuhi, semua sesuai dengan ketentuan syariah serta dilakukan oleh orang yang memiliki kelayakan untuk bermuamalah, maka akad gadai tersebut adalah sah.

2. Hukum *Rahn*

Hukum *rahn* secara umum terbagi menjadi dua, yaitu *sahih* dan *ghair sahih (fasid)*. Yaitu sebagai berikut:

⁵⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.391

⁵⁵ Zainudin, *Op.Cit.*,h. 27

⁵⁶ Sayyid sabiq, *Op.Cit.*,h. 141

a. Hukum *Rahn sah*

Rahn sah adalah *rahn* yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada suatu yang haram, seperti, mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahn*.

b. Hukum-hukum *rahn fasid*

rahn fasid adalah *rahn* yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn ghair sah* terbagi menjadi dua, yaitu :⁵⁷

- 1) Batal, tidak memenuhi persyaratan pada asal akad, seperti *aqid* tidak ahli
- 2) *Fasid*, tidak terpenuhinya persyaratan pada sifat akad, seperti borg berkaitan dengan barang lain.

Jumhur ulama fikih sepakat bahwa yang dikategorikan tidak sah dan menyebabkan akad batal atau rusak, yaitu tidak adanya dampak hukum pada *borg*. Dengan demikian, *murtahin* tidak memiliki hak untuk menahanya. Begitu pula, *rahn* diharuskan meminta kembali *borg*. Jika *murtahin* menolak dan *borg* sampai rusak, *murtahin* dipandang sebagai perampas. Oleh karena itu harus menggantinya, baik dengan barang yang sama atau dengan sesuatu yang sama nilainya. Jika *rahn* meninggal, padahal dia berutang, *murtahin* lebih berhak atas *rahn fasid* tersebut sebagaimana pada *rahn sah*.

⁵⁷ Khumedi Ja'far. Op.Cit., h. 229-230

Pendapat ulama Malikiyah hampir senada dengan pendapat ulama Hanabilah di atas, bahwa jika *rahin* didasarkan pada akad *fasid*, *murtahin* lebih berhak atas barang dari pada orang-orang yang memiliki piutang lainya. Adapun jika *borg* rusak di tangan *murtahin*, hukumnya sebagaimana pada *rahin sahih*.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa hukum akad *rahn fasid* sama dengan hukum akad *sahih* dalam hal ada atau tidaknya tanggung jawab atas *borg*. Jika pada akad *sahih borg* rusak di tangannya dan kerusakan itu bukan disebabkan olehnya, maka sebagaimana pada akad *sahih*, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Kelazimana *rahn* bergantung pada *rahin*, bukan *murtahin*. *Rahin* tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkanya, sedangkan *murtahin* berhak membatalkanya kapan saja berkehendak.

Menurut pandangan para jumhur ulama, *rahn* baru dipandang sah apabila *borg* sudah dipegang oleh *murtahin*. Sedangkan menurut ulama malikiyah cukup dengan adanya *ijab qabul*. Yang kemudian meminta izin kepada *rahin* untuk menyerahkan *borg*.⁵⁸

E. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

1. Hak *Murtahin* (penerima gadai)

- a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta

⁵⁸ Rachmat Syafe'i.. Op.Cit., h.170

benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

- b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*)
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*).⁵⁹

2. Kewajiban *Murtahin* (penerima gadai)⁶⁰

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya
- c. Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai jika utangnya telah dilunasi.

F. Hak dan Kewajiban *Rahin*

1. Hak *Rahin* (pemberi gadai)

- a. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah melunasi pinjaman hutangnya.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

⁵⁹ Sofiniyah Ghufroon, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta : Renaissan anggota IKAPI , 2007), h.26-27

⁶⁰ Indri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hsdis Nabi)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.210

- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
 - d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.
2. Kewajiban *Rahin* (pemberi gadai)
- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
 - b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam hal jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.⁶¹

G. Pemanfaatan Barang Gadai

Hakikat akad *ar-rahn* dalam Islam adalah akad *tabarru'*, yakni akad yang dilaksanakan tanpa ada imbalan dan tujuannya hanya sekedar tolong-menolong. Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaanya, maka yang memegang gadaian (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Menurut Sayyid Syabiq, Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tidak mengubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.⁶²

⁶¹ Zainudin, Op. Cit., h. 41

⁶² Sayyid Syabiq. Loc. Cit., h. 141

Berkaitan dengan barang gadaian, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas utang, apakah pihak yang menggadaikan (*rahin*) atau penerima gadai (*murtahin*)

Terkait pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang menggadaikan (*rahin*), ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas ulama, selain ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Sementara kalangan Syafi'iyah memperbolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menyebabkan nilai barang berkurang, akan tetapi jika menyebabkan nilai barang jaminan berkurang maka *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.

1. *Rahin* yang memanfaatkan *marhun*

- a. Kalangan ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikanya, apapun jenis dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkannya. Hal ini juga berlaku bagi penerima gadai, dia tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. Argumentasi kalangan Hanafiyah, karena hak menahan barang tersebut berada di tangan penerima gadai.

- b. Kalangan Hanbaliyah berpendapat senada dengan kalangan Hanafiyah. Mereka tidak memperbolehkan bagi pihak yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali seizin pihak penerima gadai. Karena barang gadaian pada dasarnya sedang dalam penahanan di tangan penerima gadai, maka pemilik barang atau pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkannya.
- c. Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa bagi pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. Izin yang diberikan pihak penerima gadai itu membatalkan gadai. Karena barang jaminan tersebut berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh.⁶³
- d. Ulama Syafi'iyah mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah, karena apabila pemilik barang itu ingin memanfaatkan *al-marhun*, tidak perlu ada izin dari pemegang *al-marhun*. Alasannya, barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan *al-marhun* tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh sebab itu, apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik bertanggung jawab untuk itu.⁶⁴

⁶³ Iman Mustofa, Op. Cit., h. 199

⁶⁴ Nasroen Haroen, Op. Cit., h. 258-259

Murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya. *Murtahin* boleh menggunakan dan mengambil air susu hewan apabila ia memberikan nafkah (memelihara hewan). Tentunya, pemanfaatan *marhun* sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan.

2. *Murtahin* yang memanfaatkan *marhun*

Masalah yang kedua adalah mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, dijelaskan sebagai berikut.:

- a. Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat tidak ada hak bagi *murtahin* untuk memanfaatkan sesuatu dari akad *ar-rahn*. Ulama Hanafiyah berpendapat *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* baik cara menggunakan, mengendarai, minum susu, atau mendiami rumah yang digadaikan, kecuali atas izin *rahin*. Karena *murtahin* hanya berhak menahan barang gadai tidak untuk memanfaatkan. *Murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh *rahin*. *Marhun* hanya berfungsi sebagai *tausiq bi addayn*, sedangkan manfaatnya tetap menjadi hak *rahin*. Jika ia memanfaatkan, kemudian barang rusak maka *murtahin* menanggungnya.

Apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* maka *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak menurut sebagian ulama Hanafiyah. Akan tetapi sebagian yang lainnya

melarang karena itu adalah riba. Keizinan dan kerelaan tidak menghalalkan riba. Memanfaatkan barang gadaian sama dengan *qardh* yang menguntungkan dan setiap bentuk *qardh* yang menguntungkan adalah riba.

Jika disyaratkan kepada *rahin* untuk memanfaatkan barang ketika akad, maka akad tersebut diharamkan karena itu adalah riba, setiap utang yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Jika tidak disyaratkan pada waktu akad dibolehkan karena itu adalah akad *tabarru'* dari *rahin* kepada *murtahin*. Ibn Nujaim seperti yang dikutip Wahbah al-Zyhaily mengharamkan *murtahin* memanfaatkan *ar-rahin*.

- b. Ulama Malikiyyah berpendapat, apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* atau *murtahin* mensyaratkan untuk memanfaatkan *marhun* hal itu tidak dibolehkan jika itu berupa utang yang timbul dari jual beli yang dilunasi sampai waktu yang ditentukan. Akan tetapi, ulama Malikiyyah tidak membolehkan jika utang itu berupa *qardh* karena *qardh* mendatangkan manfaat tidak boleh.⁶⁵

Menurut Fathi ad-Duraini, kehati-hatian para ulama fiqh dalam menetapkan hukum pemanfaatan *marhun*, baik oleh *rahin* maupun *murtahin* bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba, karena, hakikat *rahn* dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya hanya sekedar tolong-

⁶⁵ Rozalinda, Op. Cit., h. 258-259

menolong. Oleh sebab itu, para ulama fiqh menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan *marhun*, maka akad *rahn* itu dianggap tidak sah, karena hal ini dianggap bertentangan dengan tabiat akad *rahn* itu sendiri.⁶⁶

Rahn yang dikemukakan para ulama klasik hanya bersifat pribadi. Artinya, utang-piutang yang hanya terjadi antara seorang yang memerlukan dengan seseorang yang memiliki kelebihan harta.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa baik penerima gadai ataupun pemberi gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang dijadikan jaminan gadai (barang gadaian). Jika dilakukan tidak atau tanpa meminta izin terlebih dahulu, baik pihak *rahin* (yang menggadaikan) ataupun *murtahin* (yang menggadaikan)

H. Berakhirnya akad gadai

Rahn dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar utang, dan lain yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. *Borg* Diserahkan Kepada Pemiliknya

Jumhur ulama selain Hanafiyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan *borg* kepada pemiliknya (*rahin*) sebab *borg* merupakan jaminan utang. Jika *borg* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu,

⁶⁶ Nasroen Haroen, *Loc.*, Cit. h. 259

dipandang habis pula *rahn* jika *murtahin* meminjamkan borg kepada *rahn* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.⁶⁷

2. *Marhun* dijual dengan perintah hakim atas permintaan *murtahin*

Apabila *marhun* dijual dan utang yang ada dilunasi dengan harga hasil penjualan tersebut, maka akad *rahn* selesai dan berakhir. Jika penjualan *marhun* atas dasar kesadaran *rahin* sendiri atas izin *murtahin*, maka jika penjualan tersebut berlangsung setelah jatuhnya tempo pelunasan utang, maka harga hasil penjualan tersebut terikat dengan hak *murtahin*. Namun jika berlangsung sebelum jatuhnya tempo pelunasan hutang yang ada, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, harga hasil penjualan tersebut juga terikat dengan hak *murtahin* dan menjadi *marhun* menggantikan *marhun* yang dijual. Karena *rahin* menjual *marhun* atas seizin *murtahin*, maka haknya ditetapkan dalam harga hasil penjualan tersebut, sama seperti jika seandainya hutang yang ada telah jatuh tempo. Sementara itu, ulama Malikiyah, Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa akad *rahn* yang ada batal dengan dijualnya *marhun* dan *rahin* tidak berkewajiban memberi ganti dengan gadaian yang lain, sehingga hutang yang ada menjadi barang tanpa gadaian.⁶⁸

Rahn akan habis jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *borg*, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.

⁶⁷ Khumedi Ja'far, Op. Cit., h. 242

⁶⁸ Wahbah zuhaili. Op. Cit.,h. 229

a. *Rahin* telah membayar utangnya

Apabila *rahin* telah melunasi seluruh utangnya, maka akad *rahn* secara otomatis telah selesai dan berakhir.

b. Pembebasan Utang

Pembebasan utang dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

c. Pembatalan *Rahn* dari Pihak *Murtahin*

Rahn dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika pihak *rahin* yang membatalkannya.

Menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan *borg* kepada *rahin*. Hal ini karena *rahn* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan *borg* sampai dijual.

d. *Rahin* Meninggal

Para ulama berbeda pendapat dalam hal meninggalnya salah satu pihak yang berakad.

Menurut ulama Malikiyah, *rahn* habis jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah meninggalnya salah satu pihak yang berakad tidak mengakhiri akad gadai, karena

menurut ulama tersebut akad gadai bisa dilanjutkan oleh ahli waris, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah jika salah satu pihak yang berakad *rahin* atau *murtahin*, maka akad gadai berakhir

e. *Borg Rusak*

f. *Tasharuruf dan Borg*

Rahn dipandang habis apabila borg di (*tasharruf*) kan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad gadai akan berakhir apabila penggadai (*rahin*) telah dijadikan hibah, hadiah dan sedekah, mengembalikan utang pinjamannya kemudian penerima gadai (*murtahin*) mengembalikan barang yang dijadikan jaminan kepada *rahin* atau salah satu pihak meninggal dunia.

Dalam KUH perdata 1152 hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai. Apabila barang itu hilang dari tangan penerima gadai ini atau dari padanya, maka hendaklah ia menuntutnya kembali, sedangkan apabila barang gadai didaptkannya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.⁷⁰

⁶⁹ Rahmat syafei, Op. Cit.,h. 179

⁷⁰ Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 288

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pekon Negri Ratu

Pekon negeri ratu merupakan pekon tertua di marga pugung tampak yang semula bernama keratuan dipugung dan merupakan pusat marga (Ibu Kota Marga Pugung Tampak). Pekon negeri ratu telah beberapa kali berganti nama dan berpindah tempat yaitu Pematang Pugung kemudian Bandar Agung kemudian Gedung Wani kemudian Pendagan baru kemudian menjadi Negeri Ratu.

Marga pugung tampak dipimpin oleh seorang sultan (Sai Batin Marga) sebagai kepala marga. Sultan pugung tampak membawahi 10 pekon dan setiap pekon dipimpin oleh seorang Raja (Sai Batin Pekon) yang diangkat dan dipercaya oleh Sultan. Setelah kemerdekaan marga pugung tampak menjadi bagian dari kecamatan Pesisir Utara dan pekon negeri ratu merupakan salah satu yang ada di kecamatan pesisir utara.

Dalam perkembangannya penduduk Negeri Ratu saat ini terdiri beberapa suku disamping penduduk asli lampung telah banyak juga suku lainnya seperti jawa, sunda dan padang yang tentunya berpengaruh terhadap budaya dan ekonomi masyarakat. Namun demikian nilai-nilai tradisi dan budayanya tetap dilestarikan masyarakatnya.

Kepemimpinan Raja dan Sultan berlangsung secara turun temurun. Keluarga raja tinggal di rumah yang bernama Lamban Balak, sedangkan

Sultan tinggal di rumah yang bernama Lamban Gedung. Sedangkan keluarganya tinggal di rumah yang bernama Lamban Rajabasa.

2. Letak Geografis Desa Negeri Ratu

Pekon Negeri Ratu merupakan salah satu dari 12 pekon diwilayah Kecamatan Pesisir Utara yang merupakan pusat Ibu Kota Kecamatan. Luas wilayah Pekon Negeri Ratu \pm 200165 Hektar.

Keadaan Iklim Pekon Negeri Ratu sebagaimana desa –desa lain di wilayah indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tanam yang ada di pekon Negeri Ratu

Desa Negeri Ratu berbatasan dengan wilayah Desa lain, untuk lebih jelasnya batas-batas wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kerbang Langgar
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padang Rindu
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Berbatasan Lautan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Pertanian.

3. Keadaan Demografis Desa Negeri Ratu

a. Jumlah Penduduk

Pekon Negeri Ratu hanya terdiri dari 6 pemangku saja dengan jumlah penduduk \pm 2.527 Jiwa yang terdiri 258 Kepala Keluarga dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1

**Jumlah Data Penduduk Pekon Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara
Kabupaten Pesisir Barat**

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki – Laki	1170 Orang
2.	Perempuan	1357 Orang
3.	Kepala Keluarga	258 kk

Sumber : Data Pekon Negeri Ratu

b. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Tabel 2

**Jumlah Penduduk Menurut Usia Pekon Negeri Ratu Kecamatan
Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat**

N0.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	> 65	200
2.	60 – 65	150
3.	55 – 60	100
4.	50 -55	226
5.	45 -50	150
6.	40 -45	230
7.	35 -40	177
8.	30 -35	136
9.	25 -30	200

10.	20 -25	230
11.	15 – 20	200
12.	10 -15	218
13.	5 -10	166
14.	< 5	144
Jumlah		2.527

Sumber : Data Pekon Negeri Ratu

c. Jumlah Penduduk Usia Pendidikan

Tabel 3

**Tingkat pendidikan masyarakat pekon Negeri Ratu Kecamatan
Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat**

NO.	Tingkat Pendidikan	JUMLAH
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	-
2.	Tidak Tamat SD/ Sederajat	1.800
3.	Tamat SD/ Sederajat	1.000
4.	Tamat SLTP/ Sederajat	482
5.	Tamat SLTA/ Sederajat	272
6.	Tamat D1,D2, D3	13
7.	Sarjana / S1	17

Sumber : Data Pekon Negeri Ratu

d. Jenis Kesenian

Masyarakat Pekon Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara memiliki kesenian yang masih ada adalah sebagai berikut :

Tabel 4

Jenis Kesenian Pekon Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat

NO.	Jumlah Kelompok	Status
1.	Nyambai	Aktif
2.	Budindang	Aktif
3.	Budiker	Aktif
4.	Kakiceran	Aktif

Sumber : Data Pekon Negeri Ratu

e. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat pekon negeri ratu kecamatan pesisir utara kabupaten pesisir barat merupakan desa pertanian Dan berada di pinggir laut, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 5

Jumlah Mata Pencaharian Pekon Negeri Ratu Kecamatan Pesiri Utara Kabupaten Pesisir Barat

Petani	Pedagang	PNS	Nelayan	Tukang	Lain-Lain
800	30	10	180	35	-

Sumber : Data Pekon Negeri Ratu

f. Visi Dan Misi

Adapun Visi dan Misi desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat yaitu:

1. VISI

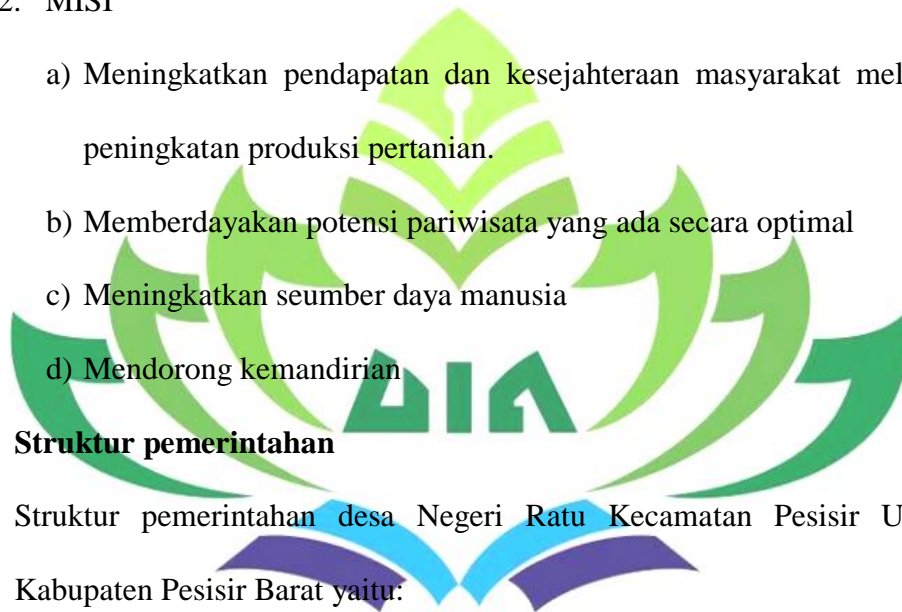
Terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sektor pertanian, perkebunan, insprastruktur, dan pariwisata.

2. MISI

- a) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian.
- b) Memberdayakan potensi pariwisata yang ada secara optimal
- c) Meningkatkan sumber daya manusia
- d) Mendorong kemandirian

g. Struktur pemerintahan

Struktur pemerintahan desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat yaitu:





B. Pelaksanaan Pengalihan Objek Gadai pada Masyarakat di Desa Negeri Ratu

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu saling membutuhkan satu sama lain, maka dari itu harus bisa saling melengkapi, dan memberi antara sesama

umat muslim. Yang pada dasarnya setiap individu memiliki permasalahan kebutuhan yang berbeda-beda, adakalanya kebutuhan itu dapat dipenuhi seketika itu juga dan adakalanya kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi seketika itu. Masyarakat di Desa Negeri Ratu pada umumnya merupakan masyarakat yang bermata pencarian utama dibidang pertanian, baik ladang, persawahan, perkebunan dan lain sebagainya.

Terjadinya gadai pada masyarakat desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat sebagian besar dilakukan oleh para petani yang mengalami kebutuhan mendesak dan memerlukan uang dengan jumlah yang cukup besar, sekalipun menunggu hasil panen kemungkinan tidak dapat menutupi besarnya uang yang dibutuhkan. Biasanya uang hasil pinjaman diperlukan untuk biaya berobat, pendidikan anak dan lain sebagainya. Masyarakat pada desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara, pada umumnya lebih memilih melakukan akad gadai dari pada meminjam uang di bank tertentu, alasannya karena bisa mendapatkan pinjaman uang yang dibutuhkan dengan cepat, tanpa adanya persyaratan yang dan ada cicilan setiap bulanya jika meminjam uang di bank. Menurut masyarakat di desa Negeri Ratu, apabila ada cicilan setiap bulannya mereka akan kesulitan karena sumber utama pencarian mereka telah dijadikan sebagai jaminan, setelah menggadaikan sawah atau perkebunannya, sebagian masyarakat di desa Negeri Ratu hanya menjadi buruh serabutan. Praktik gadai yang biasanya dilakukan yaitu dengan kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak maka akad gadai bisa secara langsung terjadi.

Demikian jika *rahin* (penggadai) membutuhkan pinjaman uang, maka *rahin* menemui *murtahin* dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang dengan menawarkan sejumlah tanah sebagai jaminan atas utang. Transaksi gadai yang dilakukan oleh kedua belah pihak bersifat tradisional, yaitu dilakukan secara lisan tanpa dihadiri saksi, karena pada dasarnya sudah saling percaya antara pihak *rahin* dan *murtahin*. Namun jika terjadi masalah dalam pelunasan maka diselesaikan dengan cara musyawarah oleh kedua belah pihak. Proses gadai tersebut yang sering dilakukan oleh masyarakat di desa Negeri Ratu.

Pelaksanaan gadai pada masyarakat di desa Negeri Ratu tanpa adanya batasan waktu sehingga *murtahin* bisa memanfaatkan tanah yang dijadikan sebagai jaminan gadai dan menikmati hasilnya sebagai imbalan dari pertolongannya terhadap *rahin*. Karena pada dasarnya *murtahin* tidak selamanya orang yang mampu dalam hal *finansial*, gadai ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dan ketika seorang *murtahin* (penerima gadai) membutuhkan uang secara mendesak untuk keperluan pribadinya, sementara *rahin* belum mengembalikan uang pinjamannya, maka selaku *murtahin* (penerima gadai) yang tidak mempunyai pilihan lain juga akan melakukan pinjaman uang dengan kerabat lainya untuk memenuhi kebutuhanya saat itu, dengan alasan *rahin* belum membayar kembali utangnya atau menebus jaminannya, sehingga pilihan satu-satunya yang dilakukan oleh *murtahin* yaitu dengan meminjam dari pihak lain.

Dalam proses pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* di desa

Negeri Ratu yaitu dengan cara memberikan atau memindahtangankan jaminan *rahin* kepada pihak lain (pihak ketiga). Dengan alasan kebutuhan yang mendesak dan penggadai (*rahin*) belum membayar utangnya, namun pengalihan barang gadai yang dilakukan oleh *murtahin* (penerima gadai) tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada *rahin* sebagai pemilik jaminan.

Di bawah ini disajikan beberapa kasus pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin*. Yang diperoleh dari Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, yaitu:

1. Praktik Gadai yang dilakukan oleh bapak Lukman dengan Tambat Zakarni

Bapak lukman menggadaikan kebun damarnya kepada bapak Tambat Zakarni pada tahun 2012, pada saat itu seorang putri pak lukman membutuhkan uang untuk biaya kuliah anaknya. Bapak Lukman mengatakan terpaksa menggadaikan kebun damarnya karena tidak memiliki pilihan lain, karena untuk mendapatkan uang yang cepat pada saat itu yaitu dengan cara meminjam uang dari kerabat yang memang sudah dikenal, untuk menjamin kepercayaan kepada bapak tambat maka bapak Lukman menyerahkan kebun damarnya sebagai jaminan.⁷¹ Adapun proses gadainya yaitu bapak Lukman pihak *rahin* menemui bapak Tambat Zakarni dengan mengatakan ingin meminjam sejumlah uang, karena uang dipinjam tidak sedikit, bapak Tambat meminta

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim warga Desa Negeri Ratu sebagai pihak *rahin*, pada 15 November 2017, Pkl. 08.00 WIB

jaminan atau sebagai bukti bahwa uang tersebut akan dikembalikan dan Bapak Lukman menyetujui akad gadai tersebut.

Bapak Tambat sebagai *murtahin* dari perjanjian gadai tersebut, menjaminkan kembali kebun damar yang dijadikan jaminan oleh *rahin* (bapak Lukman). Namun tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak *rahin* (bapak Lukman).⁷²

Bapak Tambat mengatakan, akibat dari perbuatannya yaitu pengalihan jaminan gadai yang dilakukannya menimbulkan perselisihan, sehingga tali persaudaraan menjadi tidak baik.

2. Praktik Gadai yang dilakukan oleh bapak Ahmad Suparmi dengan bapak Alkok

Menurut bapak Ahmad Suparmi menggadaikan sawahnya pada tahun 2010. Adapun proses gadai yang dilakukan hampir sama dengan gadai yang dilakukan oleh bapak Lukman, yaitu dengan datangnya bapak Ahmad Suparmi ke rumah bapak Alkok mengatakan akan meminjam sejumlah uang, namun dengan jaminan tiga petak sawah yang dimilikinya.⁷³ Bapak Alkok menyetujui akad tersebut, namun seiring waktu salah satu keluarga bapak Alkok harus dirawat kerumah sakit dan membutuhkan uang seketika itu juga, dan tanpa berpikir panjang bapak

⁷² Wawancara dengan Bapak Tambat Zakarni warga Desa Negeri Ratu sebagai pihak *murtahin*, pada 15 November 2017, Pkl. 19.00 WIB

⁷³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Suparmi warga Desa Negeri Ratu sebagai pihak *Rahin*, pada 15 November 2017, Pkl. 14.00 WIB

Alkok meminjam uang dengan salah satu tetangganya dengan menjaminkan sawahnya kepada bapak Ahmad suparmi.⁷⁴

Bapak Alkok mengakui kesalahannya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak *rahin* (bapak Ahmad Suparmi). Sekitar dua bulan setelah bapak Alkok menggadaikan kembali jaminan tersebut, bapak Ahmad mendapat informasi bahwa sawah yang dijadikan sebagai jaminan sudah berpindah tangan kepada pihak lain, kemudian bapak Ahmad menemui bapak Alkok dengan membawa sejumlah uang pinjamannya dengan maksud mengembalikan uang pinjamannya. Setelah kejadian tersebut hubungan kekerabatan antara keluarga bapak Alkok dan bapak Ahmad Suparmi menjadi tidak harmonis lagi.

3. Praktik Gadai yang dilakukan oleh bapak Khoiron dengan bapak Hermansyah

Menurut keterangan bapak Khoiron ia menggadaikan tanah sawahnya pada tahun 2014, bahwa saat itu bapak Khoiron menggadaikan sawahnya karena akan membuka suatu usaha dengan modal hasil dari menggadaikan tanah sawahnya. Bapak Khoiron memilih menggadaikan tanah sawahnya dari pada meminjam di bank dengan alasan bahwa tidak harus mencicil setiap bulannya karena dengan usaha yang baru dimulai masih banyak yang dibutuhkan.⁷⁵

Proses gadai yang dilakukan Oleh bapak Khoiron yaitu dengan mendatangi rumah bapak Hermansyah dan mengatakan akan meminjam

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Alkok warga Desa Negeri Ratu sebagai pihak *murtahin*, pada 15 November 2017, Pkl. 12.30 WIB

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Khoiron warga Desa Negeri Ratu sebagai pihak *Rahin*, pada 15 November 2017, Pkl. 16.00 WIB

sejumlah uang, yang akan dikembalikan ketika usahanya sudah menghasilkan. Namun bapak Hermansyah menggadaikan kembali tanah sawah milik bapak Khoiron kepada kerabatnya dan tidak memberitahu pihak *rahin* (bapak Khoiron). Setelah mengetahui dari salah satu temanya bahwa sawah yang dijadikan jaminan bukan bapak Hermansyah lagi yang menggarapnya. Bapak Khoiron mengembalikan uang pinjamannya dan ia terpaksa meminjam uang di bank untuk melunasi utangnya, akan tetapi hubungan antara bapak Khoiron dan bapak Hermansyah tetap harmonis hingga saat ini, karena bapak Hermansyah telah meminta maaf dan telah dimaafkan oleh bapak Khoiron.⁷⁶

Jadi pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* ini dilakukan ketika *murtahin* membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya seketika itu juga, karena pada dasarnya gadai yang ada dalam lingkungan masyarakat dilakukan atas dasar tolong-menolong antar sesama kerabat, bukan berarti *murtahin* seorang yang memiliki kelebihan harta, melainkan dengan prinsip saling membantu antara satu dengan yang lainnya.

Apabila pengalihan barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam akad gadai dan pemanfaatan tanah jaminan secara penuh oleh *murtahin* sehingga *rahin* tidak memiliki hak atas tanah jaminan tersebut, apabila praktek yang berlangsung sesuai dengan yang di tawarkan oleh M. Ali Hasan dalam bukunya berbagai macam transaksi dalam hukum Islam : “barang jaminan seperti sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak mubazir (tidak

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Hermansyah warga Desa Negeri Ratu sebagai pihak *murtahin*, pada 15 November 2017, Pkl. 19.00 WIB

produktif) dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan penggadaai atas kesepakatan bersama. Ada satu hal yang amat penting yang perlu diingat bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak milik sepenuhnya penerima gadai seperti yang berlaku di masyarakat dan praktek semacam inilah yang diupayakan supaya sesuai dan sejalan dengan Syariat Islam.”⁷⁷

Berdasarkan pengalihan barang jaminan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* di Desa Negeri Ratu yang telah dituangkan di atas, dijelaskan bahwa pengalihan barang jaminan gadai yang ada di Desa Negeri Ratu yaitu dengan memberikan jaminan atau memindahtangankan tanah yang di jadikan sebagai jaminan oleh *rahin* kepada pihak ketiga oleh *murtahin*.

Setelah melakukan wawancara dengan para responden yaitu sebagian masyarakat di desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara, ternyata masih banyak yang belum memahami bahwa *murtahin* sebagai penerima barang jaminan tidak boleh memindahtangankan barang yang dijadikan jaminan oleh pihak *rahin*, karena *murtahin* seharusnya menahan jaminan tersebut, dapat dilihat dari kata *al-hasbu* yang berarti penahanan, dan kewajiban dari seorang *murtahin* yaitu menahan barang gadai yang dijadikan jaminan oleh pihak *rahin*. Ketentuan gadai telah diatur dalam Syariat Islam. Namun atas dasar kebiasaan dan ketidaktahuan tersebut akad gadai dilakukan atas dasar kemauan antara kedua belah pihak, dan atas dasar saling percaya. Ketidakpahaman mengenai hukum gadai tersebut karena minimnya pengetahuan masyarakat serta mengutamakan kebiasaan.

⁷⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 258

C. Motivasi Pengalihan Objek Gadai pada Masyarakat di Desa Negeri Ratu

Praktik gadai pada masyarakat di Desa Negeri Ratu dilakukan secara lisan, tidak terdapat bukti secara tertulis, dan tidak dihadiri oleh saksi, sehingga objek jaminan di pihak *murtahin*. *Murtahin* (penerima gadai) adalah orang yang memberi utang kepada *rahin* dan sebagai pemegang jaminan atas utang. Tanah sawah atau perkebunan yang dijadikan sebagai jaminan *murtahin* yang memanfaatkan, sehingga hasil dari sawah atau perkebunan menjadi milik *murtahin*. *Murtahin* sebagai pemegang jaminan tentunya mempunyai hak dan kewajiban, hak *murtahin* (penerima gadai) yaitu penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*, selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*). Adapun salah satu kewajiban *murtahin* sebagai pemegang jaminan yaitu penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *murtahin* sebagai pemegang jaminan mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditaati, *murtahin* tidak diperbolehkan menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.

Masyarakat di Desa Negeri Ratu yang melakukan pengalihan objek jaminan gadai pada umumnya karena suatu keadaan yang mendesak dan

tidak mempunyai *alternative* lain untuk memenuhi kebutuhannya. menjaminkan kembali objek jaminan dari pihak *rajin* kepada pihak lain tentunya dilakukan atas dasar kemauannya sendiri tanpa meminta izin terlebih dahulu.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin pada Masyarakat di Desa Negeri Ratu

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil wawancara, data kepustakaan baik data langsung dari kitab aslinya atau kitab terjemahan, buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pengalihan Gadai tanpa sepengetahuan Rahin”, yang kemudian dituangkan dalam bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian berdasarkan hukum Islam.

Praktik gadai yang dilakukan masyarakat di desa Negeri Ratu yaitu dengan adanya penyerahan jaminan sawah atau perkebunan kepada *murtahin* sebagai jaminan atas utang oleh *rahin*. Adapun waktu pengembalian utang apabila *rahin* sudah memiliki uang untuk mengembalikan utang dan mengambil kembali jaminan sawah atau tanah yang dijadikan sebagai jaminan. Gadai menurut masyarakat desa Negeri Ratu yaitu penyerahan barang jaminan yang memiliki nilai harta yang bisa dimanfaatkan.

Transaksi gadai terjadi karena adanya kebutuhan yang mendesak, baik itu kebutuhan dalam bidang pendidikan, pengobatan ataupun kebutuhan pokok lainnya. Pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat di desa Negeri Ratu masih banyak yang belum memahami praktik gadai yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Masyarakat di desa Negeri Ratu dalam melaksanakan akad gadai terdapat pihak ketiga, Pihak ketiga yaitu pihak yang mendapatkan sawah atau perkebunan untuk diambil manfaatnya dengan memberikan uang kepada *murtahin* (pihak kedua) sebagai imbalan, sedangkan jaminan sawah tersebut merupakan milik *rahin* (pihak pertama). Ini artinya masih banyak yang belum memahami kewajibanya sebagai *murtahin*, seperti yang telah dijelaskan pada BAB II bahwa penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pelaksanaan praktik gadai dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat yang ditentukan oleh syara' sudah terpenuhi, apabila salah satu tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah.

B. Tinjauan hukum Islam tentang pengalihan gadai tanpa sepengetahuan rahin pada desa Negeri Ratu

Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan pada dasarnya manusia akan melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan diciptakan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Salah satu bentuk dari tolong menolong antar sesama yaitu dengan cara bermuamalah. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia, harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum syara', sama halnya dalam prinsip muamalah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang biasa dilakukan masyarakat di desa Negeri Ratu adalah akad gadai, yaitu suatu perjanjian dengan adanya

jaminan sawah atau perkebunan, praktik gadai semacam ini merupakan salah satu solusi ketika seseorang membutuhkan uang yang lebih untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Gadai (*ar-rahn*) yang berarti tetap dan lestari, dinamakan juga *al-hasbu* yaitu penahanan. Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu benda bernilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan atas utang, dengan jaminan tersebut maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Adapun menurut Sayyid Sabiq dikemukakan bahwa *rahn* ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian manfaat dari jaminan tersebut. Pada pelaksanaannya pihak *murtahin* belum memahami kewajibannya sebagai *murtahin*.

Pengalihan gadai yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Negeri Ratu untuk kepentingan pribadi *murtahin*, karena pihak *murtahin* membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara *rahn* belum mengembalikan uang pinjamannya. Adapun proses pengalihan gadai tersebut yaitu seorang *murtahin* mengalihkan jaminan *rahn* yang berada ditangannya kepada pihak ketiga. Dalam pelaksanaan gadai, kewajiban seorang *murtahin* adalah menjaga dan menahan jaminan dari pihak *rahn*.

Kegiatan bermuamalah dalam Islam tidak ada larangan selama tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh syara', tidak terkecuali dalam akad gadai, dalam Islam gadai diperbolehkan sebagai bentuk dari tolong

menolong antar sesama, selama tidak menyalahi hukum syara'. Sebagaimana di tegaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”

Jika dilihat dari pelaksanaan gadai di desa Negeri Ratu berdasarkan hasil wawancara, pada umumnya dilakukan atas dasar tolong menolong.

Transaksi gadai yang dilaksanakan masyarakat di desa Negeri Ratu sudah memenuhi unsur-unsur pokok yaitu:

1. Aqid (orang yang berakad) yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima jaminan).
2. Sighat (ijab dan kabul), kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin*
3. adanya barang jaminan (*marhun*) yang berupa sawah atau perkebunan sebagai obyek gadai.
4. *Marhun bih* (utang)

Dengan demikian maka proses dan pelaksanaan praktik gadai yang terjadi di desa Negeri Ratu, sudah sesuai dengan syariat Islam jika dilihat dari rukunnya, oleh sebab itu akad yang dilakukan kedua belah pihak merupakan suatu kesepakatan yang mereka buat, sesuai dengan akad perjanjian pada umumnya. Mengenai pelaksanaan akad dalam transaksi gadai yang terjadi di

Desa Negeri Ratu tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu karena *murtahin* sebagai pemegang gadai (pemegang barang jaminan yang diberikan oleh *rahin*) tidak diperbolehkan mengalihkan jaminan tersebut kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, *murtahin* hanya sebagai pemegang jaminan.

Adapun pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki dijelaskan bahwa barang yang digadaikan itu tidak lain hanyalah sebagai jaminan kepercayaan atas utang. Jika *murtahin* boleh mengambil manfaat atas benda yang dijadikan jaminan utang berarti memperbolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, hal demikian tidak dibenarkan oleh syara', dan apabila seorang *murtahin* mensyaratkan bahwa pemanfaatan barang gadai adalah untuknya pada waktu akad maka akad tersebut tidak sah.

Jumhur ulama selain Hanabilah mengemukakan bahwa, tidak ada hak bagi *murtahin* untuk memanfaatkan sesuatu dari akad *ar-rahn*, karena jaminan itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang jaminan terhadap barang itu hanya sebagai jaminan piutang yang ia berikan. Apabila *rahin* (orang yang berutang) tidak mampu melunasinya, *murtahin* boleh menjual jaminan itu untuk melunasi piutangnya.

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَغَلْيَتُهُ غَرْمُهُزْ (رواه إمام
والبيهقي وابن حبان عن أبي هريرة)

“Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya.” (HR. Al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu

Hurairah).

Apabila pemilik barang memberikan izin kepada *murtahin* (pemegang jaminan) memanfaatkan jaminan itu selama ditanganya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya, karena dengan adanya izin dari *rahin* (pemberi jaminan), maka tidak ada halangan bagi *murtahin* (pemegang jaminan) untuk memanfaatkan jaminan tersebut. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Syafi'iyah, dan ulama Malikiyah berpendapat bahwa, sekalipun pemilik barang jaminan mengizinkannya, pemegang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena hasil dari pemanfaatan atas benda yang dijadikan jaminan itu mengarah ke unsur riba yang dilarang oleh syara', adanya izin pemanfaatan dalam praktik gadai cenderung karena keadaan terpaksa, dan takut tidak mendapatkan uang pinjaman dari *murtahin*.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah:279)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa hasil kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak tidak boleh merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pihak *rahin* adalah pemilik barang sedangkan *murtahin* hanya

pihak yang mempunyai hak menahan barang jaminan sampai utang terlunasi.

Apabila yang dijadikan jaminan adalah binatang ternak, menurut sebagian ulama Hanafiyah, *murtahin* boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapatkan izin pemiliknya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian ulama Hanafiyah berpendirian bahwa apabila hewan dibiarkan saja, tanpa diurus pemiliknya, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan hewan itu sia-sia termasuk ke dalam larangan Rasulullah saw. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan menggunakannya, sesuai dengan jumlah biaya yang dikeluarkan pemegang jaminan. Akan tetapi, menurut ulama Hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, praktik gadai yang ada di desa Negeri Ratu, yaitu gadai yang dilakukan atas dasar tolong menolong, pihak *rahin* menemui *murtahin* dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman sejumlah uang dengan jaminan, agar mendapatkan kepercayaan bahwa utang tersebut akan di bayar. Adapun yang dijadikan sebagai jaminan adalah tanah, dan tidak memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Namun dalam pelaksanaannya terjadi pengalihan jaminan gadai tanpa izin terlebih dahulu kepada pihak *rahin*, sehingga menyebabkan hubungan antara *rahin* dan *murtahin* menjadi tidak harmonis.

Menurut sebagian ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah pergadaian *murtahin* batal jika barang yang ia terima sebagai gadaian tersebut justru digadaikan sendiri sebagai jaminan utang pribadinya atas seizin pemilik barang tersebut (*rahin*), hukumnya sama dengan hukum menggadaikan barang pinjaman untuk digadaikan. Namun jika *murtahin* pertama menggadaikan barang yang digadaikan kepadanya itu tanpa seizin pemiliknya (*rahin*), maka akad *rahn* yang dilakukan oleh *murtahin* pertama tersebut tidak sah, dan pemilik barang tersebut berhak mengembalikan barang tersebut ketangan *murtahin* pertama seperti semula.

Pada dasarnya yang memiliki hak atas manfaat barang jaminan adalah *rahin*. Walaupun barang jaminan (*marhun*) di bawah kekuasaan *murtahin*. *Rahin* dan *murtahin* tidak boleh mengurangi jumlah dari jaminan tersebut atau menjualnya, kecuali untuk dijual atas izin *rahin* dengan tujuan melunasi utangnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalihan barang gadai tanpa sepengetahuan *rahin* yang dilakukan di desa Negeri Ratu tidak dapat dibenarkan karena *murtahin* tidak mempunyai hak atas barang jaminan tersebut. Dan akan menimbulkan masalah di kemudian hari, sedangkan syara' menetapkan hukum untuk kemaslahatan umatnya dan seorang mukhallaf dituntut supaya berjalan sesuai dengan hukum syara' dalam segala hal yang dilakukannya. Karena segala sesuatu yang disyari'atkan adalah untuk memperoleh mashlahat dan menolak mufsadat, apabila seseorang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hukum syara' berarti orang tersebut telah melanggar hukum syara'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis hukum tentang pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* pada desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik gadai yang dilakukan di desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, dilakukan dengan perjanjian pinjam-meminjam antara *rahin* dan *murtahin* dengan jaminan tanah. Sistem perjanjian gadai yang dilakukan oleh kedua belah pihak, hanya secara lisan dan tanpa adanya saksi bahwa telah terjadi praktik gadai. Pelaksanaan dalam perjanjian tersebut *rahin* sebagai peminjam atau pemilik tanah gadai memberikan kekuasaan penuh kepada *murtahin* (penerima gadai) untuk menjaga, dan memelihara tanah jaminan. Tetapi, seiring berjalanya waktu *murtahin* memanfaatkan tanah jaminan tersebut untuk kepentingan pribadinya, dengan memindahtangankan kepada pihak ketiga dan dilakukan tanpa meminta izin kepada pihak *rahin*. Pemindahan tersebut dilakukan untuk kebutuhan *murtahin* sendiri.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* yang ada di Desa Negeri Ratu tidak dibenarkan karena dalam Islam pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* (penerima gadai) tidak diperbolehkan karena pada dasarnya kewajiban *murtahin* menjaga

menahan objek jaminan *rahin*. Adapun menurut sebagian ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, dan ulama Syafi'iyah berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena, apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara'. Karena *murtahin* hanya berhak untuk menahan barang gadai tidak untuk memanfaatkan. *Murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian sekalipunizinkan oleh *rahin*. *Marhun* hanya berfungsi sebagai *tautsiq bi ad-dayn*, sedangkan manfaat tetap menjadi hak *rahin*.

B. Saran

Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa pengalihan barang gadai di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat adalah tidak dibenarkan dalam hukum Islam, maka diperlukan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Kepada petani yang melakukan praktik gadai harus ada bukti tertulis dan adanya saksi, supaya tidak terjadi perselisihan yang tidak diinginkan dan merugikan salah satu pihak. Pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* sebaiknya tidak dilakukan karena pengalihan barang jaminan gadai tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Pihak *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan praktik gadai untuk kedepannya sebaiknya dilakukan sesuai dengan hukum Islam.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Negeri Ratu supaya mengadakan diskusi dan pengajian-pengajian mengenai hak dan tanggung

jawab dalam praktik gadai, sehingga masyarakat bisa lebih memahami cara bermuamalah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama fikih.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurahman bin Shalih Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhori Muslim*, Terjemahan, Kathur Suhardi, cet VII Jakarta: Darul Falah, 2004.
- Ahmad kamil dan M.Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Al-Juhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al Aqsani, Al Hafidh Ibnu, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terjemahan Achmad Sunarto, Jakarta; Pustaka Amani, 1995.
- Amirullah, dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 2006.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjia Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ascarya, *Akab dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Bik, Hudari, *Tarikh Al Tasyri' Al Islami, sejarah pembinaan hukum islam* Terjemahan Mohamad Zuhri, Semarang; Da'arul Ihya-Indonesia, 1980.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya Special for woman*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2008.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014.
- Fathurrahman, Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Ghofur Ruslan Abdul N, *Gadai Syariah, (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2012.
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

- Hasbi, Shiddieqy Teuku Muhammad, "*Hukum-hukum Fikih Islam*", Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Huda Nurul, heykal muhamad, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Indri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hsdis Nabi)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Khumedi, Ja,far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lmpung; Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Manan Muhammad Abdul,. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenada Media Group, 2012.
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nasroen, Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzab*, Terjemahan, Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2 Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Sabbiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, juz 12, terj. Kamaluddin A,dkk, Bandung; Alma'rif, 1997.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Nabawi*, Jakarta, Rajawai Pers, 2003.
- Shiddieqy Hasbi Ash, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Sjahdeni, Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- Sofiniyah, Ghufron, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta :
Renaissance anggota IKAPI, 2007.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2014.
- Solihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2010.
- Solihin, Bunyana, *Kaidah Hukum Islam* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta,
2008.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sujarweni V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka
Baru Pers, 2014.
- Shihab M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian Al-
Qur'an/M.Quraish Shihab*, Jilid 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syafi'i, Antonio Muhammad, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika
Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta, Zikrul
Hakim, 2003.